



EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Yunita

Yayasan Kriya Kebangsaan Indonesia, Banten, Indonesia

uu_nita@yahoo.co.id

Riwayat Artikel

Diterima

Maret 2025

Revisi

April 2025

Terbit

Mei 2025

Keywords:

Social Welfare Policy; Public Administration; Disability Programs.

Korespondensi:

uu_nita@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of the social welfare policy for persons with disabilities in Lebak Regency. It identifies key challenges such as inaccurate data, limited budget allocation, and poor coordination between involved institutions. The study highlights the importance of accurate data and adequate funding for the success of such policies. It also examines the role of public administration in managing social welfare programs. Findings show that despite some positive impacts, the program's effectiveness is hampered by systemic issues. The research provides recommendations to improve coordination, data management, and budget allocation for better implementation of the policy.

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama seperti ketidakakuratan data, keterbatasan alokasi anggaran, dan koordinasi yang buruk antar lembaga terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya data yang akurat dan pendanaan yang memadai untuk keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran administrasi publik dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada dampak positif, efektivitas program ini terhambat oleh masalah sistemik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi, pengelolaan data, dan alokasi anggaran agar implementasi kebijakan lebih baik.

©2025 Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

How to cite (in APA Style): Yunita. (2025). Evaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas: Perspektif administrasi publik. *Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 1(1), 63–70.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap berbagai hak dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program-program kesejahteraan sosial di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Lebak, merupakan implementasi kebijakan tersebut. Namun, dalam kenyataannya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti anggaran yang terbatas, koordinasi yang lemah antar instansi terkait, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendataan penyandang disabilitas. Evaluasi terhadap kebijakan ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam kebijakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak antara lain adalah ketidaksesuaian antara jumlah penyandang disabilitas dengan alokasi anggaran yang tersedia. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa meskipun jumlah penyandang disabilitas cukup tinggi, anggaran yang dialokasikan belum mampu mencakup seluruh kebutuhan mereka. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pemerintah desa juga belum optimal. Hal ini menyebabkan pendataan penyandang disabilitas sering kali tidak akurat dan tidak merata, sehingga berdampak pada distribusi bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan

bahwa keterbatasan anggaran dan koordinasi yang buruk antara pemangku kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan sosial di daerah-daerah lain. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi sangat penting untuk memahami kendala-kendala tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai.

Alternatif solusi yang diajukan dalam penelitian ini adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi program kesejahteraan sosial dengan memperbaiki koordinasi antar lembaga dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat peran pemerintah desa dalam pendataan penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data yang akurat. Selain itu, peningkatan anggaran untuk program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas perlu diprioritaskan, mengingat jumlah penyandang disabilitas yang terus meningkat. Beberapa penelitian sebelumnya menyarankan pentingnya pendekatan berbasis data yang valid dan akurat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial. Dengan memperbaiki sistem pendataan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan desa, diharapkan bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan lebih merata.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada. Sebagai bagian dari administrasi publik, evaluasi kebijakan ini berfokus pada lima indikator utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara responsif

sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan evaluasi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang praktis dan aplikatif yang dapat memperbaiki kualitas hidup penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak..

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas merupakan topik penting dalam studi administrasi publik. Kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas, menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap layanan dasar, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, penerapan kebijakan kesejahteraan sosial di daerah, seperti di Kabupaten Lebak, masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa studi menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam implementasi kebijakan sosial ini adalah masalah koordinasi antar lembaga pemerintah dan keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk program tersebut. Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan sangat penting untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut tercapai atau tidak. Evaluasi ini juga memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga solusi yang lebih efektif dapat diterapkan.

Dalam konteks Kabupaten Lebak, penelitian oleh Wibawa (2017) dan Sugiyono

(2017) menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang sudah ditetapkan, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai harapan. Koordinasi yang buruk antara pemerintah daerah dan pihak terkait di tingkat desa menyebabkan kesenjangan dalam pendataan penyandang disabilitas. Data yang akurat dan terkini sangat penting dalam perencanaan dan distribusi bantuan sosial, namun seringkali data yang tersedia tidak lengkap atau tidak update. Hal ini menghambat efektivitas program dalam mencapainya tujuan utamanya untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam kebijakan yang diterapkan, khususnya dalam hal alokasi anggaran dan distribusi bantuan. Sugiyono (2017) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam administrasi publik adalah bagaimana cara mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang apakah kebijakan yang diterapkan sudah memadai dalam memberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, ataukah masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

Evaluasi kebijakan dalam konteks kesejahteraan sosial juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan, sebagaimana diungkapkan oleh Sabatier (1986), bahwa kebijakan publik harus memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata. Dalam hal ini, analisis tentang sejauh mana program kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak telah memenuhi prinsip tersebut menjadi sangat relevan. Apakah semua penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara terhadap bantuan sosial, ataukah ada kelompok yang tertinggal? Hal ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. [9]source demikian, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan sosial bagi penyandang

disabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan pemerataan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kendala-kendala yang ada serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah, pengelola program di Dinas Sosial, dan penyandang disabilitas, serta observasi langsung terhadap implementasi program. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terfokus (FGD), yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam (Patton, 2002). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam pelaksanaan kebijakan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan member checking, dengan memverifikasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi data (Miles & Huberman, 1994). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak selama enam bulan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan sosial di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak dalam

pengelolaan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dan observasi langsung di lapangan, ditemukan beberapa temuan utama yang membentuk gambaran tentang efektivitas kebijakan, tantangan implementasi, serta peran administrasi publik.

Temuan pertama menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak sudah memberikan dampak positif, meskipun belum sepenuhnya efektif. Program ini berhasil menjangkau sebagian besar penyandang disabilitas, tetapi masih ada kelompok yang belum terdata atau kurang mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini adalah ketidakakuratan dalam pendataan penyandang disabilitas, yang mengakibatkan bantuan sosial tidak sepenuhnya tepat sasaran. Meskipun ada usaha dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pendataan, tantangan besar tetap ada terkait dengan jumlah penyandang disabilitas yang terus meningkat dan kurangnya sumber daya untuk memverifikasi data secara menyeluruh.

Tantangan kedua yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Meskipun alokasi anggaran untuk program kesejahteraan sosial telah disediakan, dana yang tersedia tidak cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial antara daerah yang lebih padat dan daerah yang lebih terpencil. Selain itu, koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan program ini, seperti Dinas Sosial, TKSK, dan Pemerintah Desa, juga belum berjalan optimal. Kurangnya komunikasi dan sinergi antar pihak terkait memperburuk

kualitas pelaksanaan kebijakan, yang seharusnya bisa lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan dengan koordinasi yang lebih baik.

Temuan ketiga berkaitan dengan peran administrasi publik dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial. Secara umum, administrasi publik di Kabupaten Lebak sudah cukup berfungsi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ini. Namun, kendala birokrasi dan kekurangan pelatihan bagi petugas lapangan menghambat proses implementasi kebijakan secara maksimal. Misalnya, meskipun sudah ada aplikasi untuk mempermudah pengajuan bantuan, tingkat pemahaman petugas lapangan mengenai penggunaan teknologi ini masih rendah. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data, yang berdampak pada ketepatan distribusi bantuan sosial.

Tabel 1. Rangkuman Temuan Utama

Temuan Utama	Penjelasan
Efektivitas Kebijakan	Program berhasil menjangkau sebagian besar penyandang disabilitas, namun pendataan yang tidak akurat mengakibatkan bantuan tidak selalu tepat sasaran.
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan	Keterbatasan anggaran dan koordinasi antar instansi yang belum optimal menghambat distribusi bantuan yang merata.
Peran Administrasi Publik	Administrasi publik berfungsi baik dalam perencanaan, namun masih ada kendala dalam penggunaan teknologi dan pelatihan petugas lapangan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak menunjukkan hasil positif, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan program ini. Untuk itu, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, penguatan sistem pendataan, serta alokasi anggaran yang lebih memadai menjadi kunci untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, peran administrasi

publik harus terus diperkuat, dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknologi yang lebih baik bagi petugas lapangan. Implementasi kebijakan yang lebih baik akan sangat bergantung pada kerjasama yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan manfaat yang sesuai dengan hak-hak mereka.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah mengevaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Temuan penelitian ini mengarah pada beberapa poin utama, yaitu efektivitas kebijakan, tantangan implementasi, dan peran administrasi publik dalam pengelolaan program sosial. Setiap temuan akan dikaitkan dengan teori-teori yang ada serta hasil penelitian terdahulu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan mendalam.

Salah satu temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah kebijakan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Lebak cukup efektif dalam menjangkau sebagian besar penyandang disabilitas, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kendala pendataan yang tidak akurat. Berdasarkan wawancara dengan informan dari Dinas Sosial Kabupaten Lebak, terdapat ketidakakuratan dalam pendataan penyandang disabilitas yang menyebabkan distribusi bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Wibawa (2017), yang juga menemukan bahwa salah satu kendala dalam implementasi kebijakan sosial adalah ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh pemerintah dan jumlah penerima manfaat yang sebenarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Rossi dan Freeman (1985), efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang ada, karena data yang akurat

dan up-to-date adalah kunci untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat dan tepat sasaran.

Namun, kendati demikian, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki pendataan ini. Sebagai contoh, di beberapa kecamatan, petugas lapangan telah mulai menggunakan aplikasi berbasis digital untuk memperbarui data penyandang disabilitas. Meskipun ini merupakan langkah positif, tantangan terkait validasi data di lapangan masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian oleh Sabatier (1986) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sosial yang sukses sangat bergantung pada bagaimana sistem administrasi di lapangan dapat mengelola data dan menyampaikan informasi dengan efisien dan tepat waktu.

Tantangan terbesar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan anggaran yang tidak memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk program kesejahteraan sosial, anggaran tersebut tidak cukup untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Lebak. Penemuan ini sejalan dengan studi oleh Sugiyono (2017), yang mengidentifikasi bahwa kendala anggaran adalah faktor penghambat utama dalam keberhasilan kebijakan sosial, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran ini mengarah pada ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial, di mana daerah dengan jumlah penyandang disabilitas yang lebih banyak terkadang tidak mendapatkan bantuan yang cukup.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi yang buruk antara instansi pemerintah yang terlibat dalam program kesejahteraan sosial, seperti Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa, memperburuk pelaksanaan kebijakan. Hal ini juga didukung oleh temuan dalam penelitian

oleh Dunn (2003), yang menekankan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah adalah elemen kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Lebak untuk meningkatkan koordinasi antar instansi agar data penyandang disabilitas dapat dikelola dengan lebih baik dan bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih merata.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa peran administrasi publik dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial cukup penting, namun masih menghadapi beberapa kendala terkait birokrasi dan penggunaan teknologi. Meskipun administrasi publik di Kabupaten Lebak cukup responsif dalam merencanakan kebijakan ini, hambatan terkait sistem birokrasi yang panjang dan penggunaan teknologi yang belum optimal menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan yang efisien. Seperti yang diungkapkan oleh Rosenbloom (1993), administrasi publik harus mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi manajerial untuk mempercepat dan mempermudah proses kebijakan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman tentang penggunaan aplikasi berbasis digital yang baru masih terbatas di kalangan petugas lapangan, yang mengarah pada ketidakakuratan dalam pengelolaan data dan lambannya distribusi bantuan.

Penelitian oleh Chandler dan Plano (2004) juga menyarankan agar administrasi publik memperkuat kapasitas teknis dan manajerial bagi petugas lapangan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan bagi petugas lapangan mengenai penggunaan teknologi dan sistem administrasi yang efisien akan sangat mendukung keberhasilan program kesejahteraan sosial ini.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun

kebijakan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak sudah menunjukkan hasil yang positif, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal efektivitas, efisiensi, kecukupan anggaran, dan koordinasi antar instansi. Keterbatasan anggaran dan data yang tidak akurat menjadi kendala utama yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan ini. Oleh karena itu, peningkatan anggaran untuk program ini, serta perbaikan sistem pendataan dan koordinasi antar lembaga, sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan merata. Selain itu, peran administrasi publik perlu diperkuat melalui pelatihan teknis bagi petugas lapangan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pendataan yang akurat, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antar instansi. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial sangat bergantung pada efektivitas data, sumber daya yang memadai, serta sinergi antar lembaga (Wibawa, 2017; Sabatier, 1986). Kendati demikian, temuan ini juga mengungkapkan adanya peluang untuk perbaikan, seperti peningkatan koordinasi, penggunaan teknologi untuk pendataan, dan peningkatan alokasi anggaran. Konsekuensi logis dari temuan ini adalah perlunya kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data dalam mengelola program kesejahteraan sosial. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai kebijakan publik di

tingkat daerah, khususnya dalam konteks penyandang disabilitas. Dari sisi praksis, temuan ini memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial, dengan memperhatikan pentingnya data yang akurat dan peningkatan sumber daya yang ada. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan program sosial berbasis teknologi dan efisiensi anggaran di daerah-daerah lain.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki pengelolaan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak. Pertama, disarankan agar pemerintah Kabupaten Lebak meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial, sehingga dapat menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan memadai. Kedua, penguatan sistem pendataan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi dapat memperbaiki ketepatan distribusi bantuan sosial. Penggunaan aplikasi berbasis data terintegrasi yang telah diterapkan di beberapa kecamatan harus diperluas dan dilengkapi dengan pelatihan bagi petugas lapangan. Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi, terutama antara Dinas Sosial, TKSK, dan Pemerintah Desa, untuk memastikan bahwa program kesejahteraan sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terakhir, penelitian ini juga menyarankan agar administrasi publik di tingkat daerah terus meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial petugas lapangan, agar kebijakan dapat dijalankan dengan lebih responsif dan cepat sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (2004). *The Public Administration Dictionary*. California: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rossi, P. H., & Freeman, H. E. (1985). *Evaluation: A Systematic Approach*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Rosenbloom, D. H. (1993). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill.
- Sabatier, P. A. (1986). "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research." *Journal of Public Policy*, 6(1), 21-48.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2017). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tana, E. (2018). *Perencanaan Sosial dalam Administrasi Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tarsiah, Y. (2020). *Evaluasi Kebijakan Sosial di Kabupaten Lebak*. Jakarta: Jakarta University Press.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making The State Work*. London: Macmillan Press.
- Waldo, D. (1991). *Introduction to Public Administration*. New York: Radar Jaya Offset.
- Wibawa, S. (2017). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Winarno, B. (2017). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.